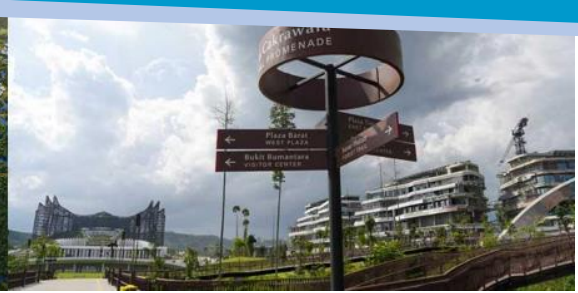


RISIKO FISKAL PROGRAM IBUKOTA NUSANTARA



IKN

VISI

Kota Dunia untuk Semua

TUJUAN

Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia

PENDANAAN

TOTAL ANGGARAN

Rp 466 Trilyun

SKEMA PENDANAAN

APBN – KPBU – BUMN/SWASTA

Program Ibukota Nusantara merupakan Program Prioritas Nasional berupa pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Program ini memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu kota yang berkelanjutan (smart & green city), serta meningkatkan pemerataan pembangunan. Tujuan ini akan dicapai melalui tiga tahapan dengan prakiraan biaya sebesar Rp 466 triyun, yang diharapkan tuntas pada tahun 2045.

TAHAPAN PEMBANGUNAN

2020
– 2024



Pembangunan infrastruktur utama dan dasar.
Pemindahan ASN tahap awal.

2025
– 2035



Pengembangan pusat inovasi dan ekonomi prioritas.
Penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan IKN.

2035
– 2045



Pembangunan konektivitas dalam dan antarkota.
Pengembangan pusat inovasi dan pengembangan talenta.

SEKILAS PEMBANGUNAN IBUKOTA NUSANTARA



Tgl 16-08-2019 Presiden Jokowi mengusulkan pemindahan ibukota Negara ke Penajam Paser Utara. Hal ini diikuti dengan penerbitan UU 3/2022 yang diubah UU no 21/2023.



Desain IKN disayembarakan dan ditetapkan. Tahun 2022 dimulai pembebasan lahan dan berbagai persiapan termasuk rencana pembiayaan.



Pembangunan infrastuktur Tahap 1 dimulai seperti Istana Negara, Kantor Kementerian, Bendungan Sepaku, Bandara, Jaringan Jalan dan Rumah Susun Pegawai.

Tanggal 17 Agustus 2024 dilakukan Peringatan Kemerdekaan RI di IKN. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dimulai dari pemindahan Pegawai Kantor Otorita IKN pada awal tahun 2025



Walaupun tahun 2025 Pembangunan Tahap 1 belum sepenuhnya selesai, pembangunan IKN tetap dilanjutkan. Pembangunan berbagai sarana pendukung seperti Rumah Sakit, Hotel, Sekolah dan infrastruktur lainnya tetap berjalan, walaupun mengalami berbagai penyesuaian sesuai dengan strategi pembangunan Presiden Prabowo.

ANALISIS RISIKO FISKAL

Risiko Fiskal merupakan suatu kejadian yang mungkin terjadi dan jika terjadi dapat menimbulkan tekanan fiskal bagi Pemerintah atau organisasi (IMF, 2009). Pengelolaan Risiko Fiskal bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fiskal bagi jalannya suatu program atau kegiatan pemerintah. Kegagalan dalam mengelola risiko fiskal dapat berdampak pada terhambatnya atau terhentinya pelaksanaan Program Kerja.

METODE ANALISIS



Data Analytic

Kuisisioner



Diskusi Kelompok



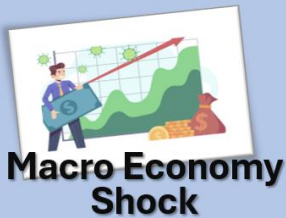
FISCAL RISK MAP 2025 - 2027



Risiko Fiskal Utama Program IKN 2 tahun mendatang adalah terjadinya Pembengkakan Belanja (**Cost Overrun**) dan Keterbatasan Sumber Pendanaan (**Stretched Fiscal Resources**). Terjadinya Pembengkakan Anggaran muncul karena terjadi **Macroeconomy Shock** (guncangan ekonomi yang mengakibatkan gejolak kurs & inflasi), **Korupsi**, dan **Time Pressure** (akibat terjadi **Scope Creep** dan **Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan**). Sedangkan Keterbatasan Sumber Pendanaan terjadi karena **Kegagalan Mendapatkan & Merealisasikan Komitmen Investasi**. Pengelola Program IKN harus menjaga secara ketat efektivitas sistem pengendalian atas risiko-risiko tersebut.

Risiko lain seperti terjadinya **Tuntutan Hukum**, **Risiko Sosial**, dan **Risiko Politik** tidak terlalu mengancam namun tetap harus diamati perkembangannya. Sedangkan Risiko seperti **Ketidaktepatan Penggunaan Teknologi & Demo Pekerja** diprediksi tidak menjadi ancaman berarti bagi keberlanjutan fiskal Program IKN.

PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO



Macro Economy Shock

Pengendalian kunci untuk antisipasi Guncangan Ekonomi pada proyek besar antara lain menggunakan Lindung Nilai (Hedging), Fixed Price Contract, Klausul eskalasi pada kontrak, dan alokasi anggaran untuk antisipasi guncangan ekonomi. Pemantauan Risiko dilakukan dengan memantau KRI yaitu fluktuasi kurs, tingkat bunga, tk. Inflasi, serta indeks harga. Selain itu dilakukan pemantauan kinerja biaya dan kemajuan dengan CPI dan SPI.



Corruption

Pengendalian kunci untuk antisipasi Risiko Korupsi a.l penerbitan kebijakan anti korupsi, penerapan Fraud Risk Management dan whistleblower system serta penembangan prosedur anti korupsi di level aktivitas. Pemantauan Risiko ini dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi red flag/ symptom spt perilaku & gaya hidup pada pejabat dan pegawai. Analisis atas hotline berita media dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.



Time Pressure

Pengendalian kunci untuk Scope Creep adalah pernyataan Scope pekerjaan yang jelas, aturan perubahan yang tegas, & Scope Freeze Policy. Sedangkan pengendalian untuk risiko Delay, analisis CPA atau PERT, Alokasi Buffer Time, dan pasal sanksi keterlambatan pada kontrak. Upaya mitigasi atas tekanan waktu perlu dikembangkan. Pemantauan atas Risiko ini dapat menggunakan analisis Kurva S atau Schedule Performance Index.



Failed Commitment to Invest

Pengendalian kunci untuk mengantisipasi kegagalan mendapatkan investor adalah Feasibility Study Program yang kokoh. Insentif Pajak, alternatif model pendanaan, dan Jaminan Pemerintah bisa juga menjadi control system yang dibutuhkan. Pemantauan Risiko dapat dilakukan dengan melakukan analisis sentimen kepada para lembaga keuangan atau calon investor. Tanda-tanda penarikan komitmen harus direspon dengan tepat